



Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi

Ahmad Soleh · Ayu Ardilla

Abstract. This study analyzes how the role of fiscal decentralization on economic growth, the human development index and direct and indirect employment absorption that occurred in Jambi City. We applied descriptive qualitative and quantitative methods. The results of the study show: 1) The average degree of fiscal decentralization in Jambi City is 12.11 percent and is included in the less criteria. 2). There is a negative and insignificant influence between the degree of fiscal decentralization on economic growth in Jambi City. 3). Based on the direct impact, the degree of fiscal decentralization has a positive and not significant impact on the temporary HDI towards the absorption of positive and significant workforce. 4) Based on the impact indirectly the degree of fiscal decentralization has a positive and not significant effect on the development index and has a positive and not significant effect on employment.

Keywords: DDF , IPM, Penyerapan Tenaga Kerja.

©2018 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan lebih dari satu dekade namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah sesuai dengan keunggulan dan potensi masing-masing daerah.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mardiasmo (2009),

Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia tahun 2010-2025. Desain tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat integrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Melalui desentralisasi diharapkan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

Ahmad Soleh (✉)
Dosen STIE Muhammadiyah Jambi
Email : mas.soleh@yahoo.com

Ayu Ardilla
Mahasiswa STIE Muhammadiyah Jambi
Email : ayuardila12@yahoo.co.id

semakin membaiknya tingkat desentralisasi diharapkan berdampak pada peningkatan indek pembangunan manusia dan juga penyerapan tenaga kerja. Karena meningkatnya derajat desentralisasi fiskal mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan untuk pembangunan daerahnya masing masing.

Namun secara riil kondisi ini masih sering jauh dari apa yang diharapkan, peningkatan derajat desentralisasi fiskal justru tidak berpengaruh terhadap terhadap peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini sering terjadi karena adanya kesalahan dalam perencanaan, kondisi wilayah, pelaksanaan kegiatan dan faktor penghambat lainnya. Atas dasar permasalahan yang ada kami melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui berapa besar peran derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi secara jelas tentang berapa besar dampak dari pelaksanaan desentralisasi terhadap peningkatan IPM dan penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Selain itu dalam pengumpulan data kami menggunakan metode *library research* dengan cara menelaah bahan teoritis dari buku teks, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, yaitu berapa besar derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dengan menggunakan Model derajat desentralisasi fiskal (DDF) sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF = Derajat desentralisasi fiskal

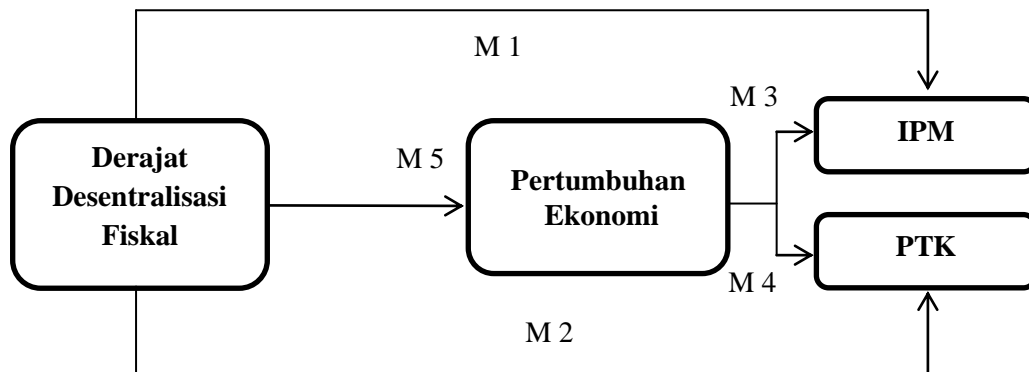
PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Sementara untuk menjawab masalah kedua menggunakan analisis jalur dengan melihat pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Untuk mendapatkan nilai pengaruh langsung dan tidak langsung digunakan analisis regresi dengan variabel intervening (variabel antara atau mediating) yang berfungsi memediasi hubungan antara variabel independent dan dependent. Alur penelitian antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1
Hubungan Antar Variabel



Keterangan:
Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung dalam penelitian ini ditunjukkan pada parameter M1 dan M2 yang diperoleh dari hasil regresi antara DDF dengan IPM, DDF dengan PTK.

Pengaruh tidak langsung

Pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini yaitu ditunjukkan oleh parameter M3 dan M4 melalui M5 yang merupakan nilai *Standar coeficient (beta)* yang diperoleh dari hasil regresi antara DDF terhadap IPM melalui Pertumbuhan Ekonomi, dan DDF Terhadap PTK melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Operasional Variabel

- a. Derajat Desentralisasi fiskal : Rasio pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah
- b. Pertumbuhan ekonomi : Peningkatan jumlah PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dalam kurun waktu yang ditentukan
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : Perbandingan dari nilai harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.
- d. Penyerapan Tenaga Kerja : Banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Jambi

Hasil analisis dengan menggunakan model derajat desentralisasi fiskal maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel.1.Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Jambi

Tahun	Pendapat Asli Daerah (Rupiah)	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	DDF (persen)	Kriteria DDF
2007	38.091.111.699,16	477.793.566.539,16	7,97	Sangat Kurang
2008	40.740.151.274,00	551.182.791.274,00	7,39	Sangat Kurang
2009	45.932.713.274,00	563.971.020.553,00	8,14	Sangat Kurang



2010	68.105.009.962,00	603.349.740.667,00	11,29	Kurang
2011	78.354.836.287,00	766.321.417.034,00	10,22	Kurang
2012	91.179.957.018,00	883.399.425.045,00	10,32	Kurang
2013	109.338.025.215,00	1.102.088.600.489,00	9,92	Sangat Kurang
2014	175.132.847.400,00	1.220.463.475.453,00	14,35	Kurang
2015	294.536.444.500,00	1.361.940.689.524,00	21,63	Sedang
2016	303.486.943.000,00	1.532.048.090.999,00	19,82	Kurang
Rata-rata			12,11	Kurang

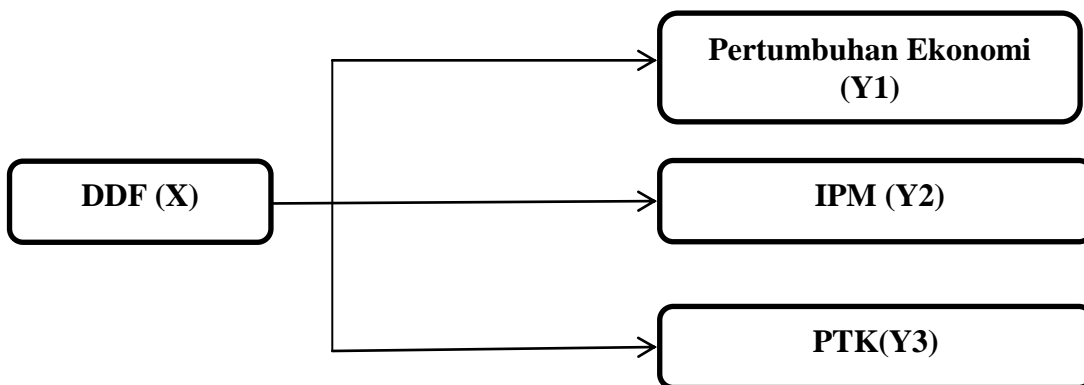
Sumber data : Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

Rasio DDF yang tertinggi yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 21,63 persen, dalam kriteria Sedang. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata tingkat DDF Kota Jambi dari tahun 2007-2016 adalah sebesar 12,11 persen. Berdasarkan kriteria penilaian DDF maka derajat desentralisasi kota Jambi termasuk kedalam kriteria kurang.

Artinya peranan PAD Kota Jambi terhadap pendapatan daerah masih rendah sehingga Kota Jambi dikatakan belum mandiri secara fiskal. Dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan dikatakan belum berhasil dalam pelaksanaan otonomi daerah. DDF salah satu aspek penting dari pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan, karena DDF menggambarkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui DDF di Kota Jambi masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran daerahnya secara mandiri. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD. Selama ini sumber dana pendapatan daerah pada APBD Kota Jambi masih bergantung dari Dana Perimbangan (Transfer dari pemerintah pusat), Padahal kemandirian keuangan merupakan hal yang penting dalam melaksanakan otonomi daerah.

B. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penyerapan Tenaga Kerja (PTK)

Gambar 2
Alur pengaruh Antar Variabel secara langsung



Hasil Pengujian Koefisien Jalur

Variabel	Koefisien	C.R.	Prob.	Keterangan
$X \rightarrow Y1$	-0.478	1.541	0.162	Tidak signifikan
$X \rightarrow Y2$	0.314	0.936	0.376	Tidak signifikan
$X \rightarrow Y3$	0.815	3.975	0.004	Signifikan

Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal (DFF) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Kesimpulan ini dapat dibuktikan secara empiris, yaitu dapat dilihat dari perhitungan regresi linier sederhana. Hasil perhitungan menunjukkan nilai dari *standardized coefficient* atau *Beta* -0,478.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung temuan empiris yang sebelumnya pernah dilakukan oleh; Sirajudin al-aksari (2014) dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo, menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo. Sementara, Hadi Sasana (2009), dalam penelitiannya yang berjudul Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh dan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Namun hasil penelitian ini yang telah dilakukan sejalan dengan penelitian Bambang Saputra yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini disebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Jambi yang dilihat dari hasil persentase Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) masih dalam kriteria kurang, sehingga belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Jambi.

Selain itu juga pengeluaran daerah Kota Jambi lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan daerah. Penerimaan tumbuh lebih rendah daripada tingkat pengeluaran hal tersebut menyebabkan Kota Jambi selalu mengalami defisit. Pengeluaran akan berdampak positif bagi perekonomian Kota Jambi apabila di proposikan lebih besar terhadap pengeluaran modal yang berwujud investasi sehingga akan memberikan pengaruh dan kemajuan ekonomi di masa mendatang.

Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DDF berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM di Kota Jambi. Kesimpulan ini dapat dibuktikan secara empiris, yaitu dapat dilihat dari perhitungan regresi linier sederhana menggunakan Program SPSS 16 yang menunjukkan nilai *t-Value* atau CR $0,936 < 2,306$ atau nilai *p* sebesar $0,376 > 0,05$.

Artinya DDF belum optimal dalam meningkatkan IPM di Kota Jambi, Hal itu dibuktikan dengan nilai *standardized coefficient* atau *Beta* sebesar 0,314 bahwa besarnya pengaruh DDF terhadap IPM adalah 31,4 persen.



Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan keuangan daerah yang pada sub bab sebelumnya telah dibahas bahwa keuangan daerah Kota Jambi yang dilihat dari penerimaannya belum mampu meningkatkan perekonomian daerah sehingga membuat proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dengan optimal, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di Kota Jambi

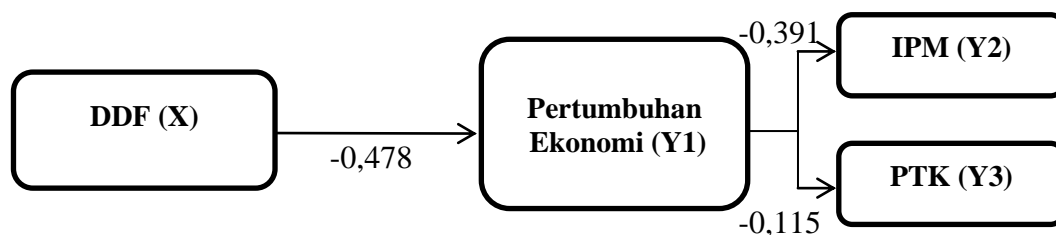
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara DDF dengan PTK di Kota Jambi. Kesimpulan ini dapat dibuktikan secara empiris, yaitu dapat dilihat dari perhitungan regresi linier sederhana menggunakan Program SPSS 16 yang menunjukkan nilai *t-Value* atau CR $3,975 > 2,306$ atau nilai *p* sebesar $0,004 < 0,05$.

Artinya DDF mampu meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *standardized coefficient* atau *Beta* yaitu sebesar 0,815. Dapat dijelaskan bahwa DDF mampu mempengaruhi PTK di Kota Jambi sebesar 81,5 persen.

Desentralisasi Fiskal yang pengeluarannya dipusatkan untuk belanja modal dan pembangunan daerah dapat meningkatkan pelayanan publik. Selain itu pengeluaran pemerintah yang dimanfaatkan untuk mengerjakan proyek-proyek baru yang padat karya secara langsung akan menyerap banyak tenaga kerja karena memerlukan sumber daya manusia untuk mengerjakannya dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

C. Bagaimana Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Secara Tidak Langsung

Alur Pengaruh Antar Variabel Secara Tidak Langsung



Hasil analisis pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Penyerapan Tenaga kerja di Kota Jambi :



Hasil Koefisien Jalur

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh		
		Langsung	Tidak Langsung	Total
X → Y1	-0,478	-0,478	-	-0,478
Y1 → Y2	-0,391	-0,391	-	-0,391
Y1 → Y3	-0,115	-0,115	-	-0,115
X→Y2	0,314	0,314	-0,478 X -0,391 = 0,186	0,5
X→Y3	0,815	0,815	-0,478 X -0,115 = 0,054	0,869

Dari Tabel diatas menunjukkan, *pertama* pengaruh tidak langsung DDF terhadap IPM yaitu 0,186. Artinya DDF berpengaruh terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 18,6 persen. *Kedua* pengaruh tidak langsung DDF terhadap PTK yaitu 0,054. Artinya, melalui pertumbuhan ekonomi, DDF berpengaruh terhadap PTK yaitu sebesar 5,4 persen.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas yaitu pengaruh antar variabel secara langsung dan tidak langsung dapat dijelaskan bahwa pengaruh DDF secara langsung terhadap IPM dan PTK di Kota Jambi menunjukkan pengaruh yang lebih baik daripada pengaruh DDF terhadap IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja secara tidak langsung.

Hal yang sama juga dijelaskan pengaruh secara langsung DDF terhadap PTK menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan secara tidak langsung atau melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil menunjukkan besarnya pengaruh DDF terhadap PTK adalah 81,5 persen sedangkan melalui pertumbuhan ekonomi derajat desentralisasi fiskal hanya mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 5,4 persen saja.

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

1. DDF Kota Jambi tahun 2007-2016 rata-rata sebesar 12,11 persen.
2. DDF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Pengaruh secara langsung menunjukkan bahwa :
 - a. DDF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.
 - b. DDF berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
4. Pengaruh secara tidak langsung menunjukkan bahwa :
 - a. DDF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.
 - b. DDF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PTK

B. Saran

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam upaya meningkatkan Derajat desentralisasi fiskal di Kota Jambi. Pemerintah perlu melakukan optimalisasi dengan melakukan inovasi dan kreatifitas guna meningkatkan pendapatan daerah, dengan terus berusaha untuk



- menggali potensi-potensi baru daerah dan mengembangkan potensi pendapatan daerah yang sudah ada.
2. Dalam pelaksanaannya, sebaiknya pemerintah lebih bijak dalam penggunaan dana anggaran. Pemerintah Kota Jambi harus lebih efisien dalam menggunakan anggaran yang digunakan terutama untuk pengeluaran rutin. Dan pengelolaan fiskal daerah harus dititik beratkan pada kebutuhan dan prioritas pembangunan. Pengeluaran daerah yang proporsi belanja modalnya lebih besar dapat mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.
 3. Pemerintah daerah Kota Jambi harus mengupayakan kemandirian daerah, karena jika sudah lebih mandiri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan serta hak masyarakat lokal.
 4. Dalam mengalokasikan anggaran sebaiknya di proposikan lebih besar terhadap pengeluaran modal yang berwujud investasi agar memberikan pengaruh dan kemajuan ekonomi di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito dan Andie Megantara. 2009 . *Era kebijakan fiskal: pemikiran, konsep dan implementasi*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Al-aksari, Sirajuddin. 2014. *Jurnal pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bungo*. Jambi: Universitas Jambi
- Al-Tuwajiri, S.A., Christensen, T.E. dan Hughes II, K.E. 2004. *The Relations among environmental disclosure, environmental performance, and economic performance: a simultaneous equations approach*. *Accounting, Organizations and society*. Vol.29.pp.447-471.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik. *Kota Jambi Dalam Angka Berbagai Tahun*. Badan Pusat Statistik Kota Jambi.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Boediono. 2009. *Teori pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara. 2007. *Proses Penyusunan APBD*
- Djojohadikusumo, Sumitro. *Ekonomi (Dunia ketiga, Teori Pembangunan, Kemiskinan) 1994*. Perpustakaan Freedom.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2010. *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ed.5*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mulyana, B. 2006. *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. [Http://www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id)
- Priansa, Donni Juni. 2016. *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Bandung: Alfabeta



- Ridwan, Agung, syaparuddin, dan Candra Mustika. 2017. *Jurnal Pengaruh sumber pembiayaan desentralisasi fiskal terhadap PDRB dan tingkat kemiskinan di kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jambi: Universitas Jambi
- Rochjadi, Ahmad. 2006. *Tinjauan pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sasana, Hadi. 2009. *Jurnal Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Jawa Tengah*. Jawa Tengah: Universitas Diponegoro Semarang
- Sinaga, Azwir. 2005. *Analisa kesempatan kerja sektoral di Propinsi Sumatera Utara, Medan*.
- Soleh, Ahmad, Iwan EP dan Nurdin. 2018. *Potret Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi*. Kota Jambi: CV.Salim Media Indonesia
- Suratno, dkk. 2006. *Pengaruh Enviromental Performance terhadap Enviromental Disclosure dan economic performance. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*
- Todaro, Michael P, dan Stephen C Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi 9*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. *Tentang Pengaruh Mengenai Bagi Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan*
- Wibowo,puji. 2008. *Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5, No. 1 Oktober 2008.



Halaman sengaja dikosongkan

